

No. : 2025/10-20/KOL-045
Perihal : Undangan Pelatihan Teknis Pelaku FIP di Indonesia
Lampiran : 1 rangkap

Kepada Yth. (terlampir)
Di tempat
Dengan hormat,

Fisheries Improvement Program (FIP) merupakan inisiatif kolaboratif stakeholder perikanan untuk mewujudkan praktik perikanan yang berkelanjutan dalam memenuhi standar internasional serta memperluas akses pasar global. Namun dalam pelaksanaannya, banyak pelaku di lapangan menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan dalam hal penentuan stok ikan, perlindungan lingkungan, serta tata kelola dan koordinasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, akan dilaksanakan pelatihan yang dirancang guna memperkuat kapasitas pelaku FIP dalam memahami alur koordinasi antar stakeholder untuk memenuhi Prinsip 1 – 3 Standar Perikanan MSC, memetakan lembaga rujukan sesuai isu teknis, serta membangun jejaring nasional antar-FIP agar koordinasi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 November 2025
Waktu : 08.30 – 17:00 WITA
Tempat : [Hotel Grand Palace Sanur](#), Jl. Bypass Ngurah Rai No.165, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80228

Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh *Marine Stewardship Council (MSC)* Indonesia. Panitia akan memberikan dukungan pembiayaan kegiatan selama pertemuan berupa tempat kegiatan (meeting room), konsumsi saat acara dan paket akomodasi. Diharapkan peserta dapat segera mengkonfirmasi kehadiran untuk pendaftaran akomodasi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terkait keperluan akomodasi, panitia akan menyiapkan dengan durasi Check in 17 November 2025 dan Check out 19 November 2025. Penerima khusus untuk peserta dari luar Provinsi Bali.
2. Alokasi kamar akan mengikuti ketersediaan, panitia dapat menempatkan peserta di luar dari lokasi kegiatan pelatihan.
3. Untuk konfirmasi partisipasi kegiatan, mohon dapat menghubungi staf MSC Indonesia **Catherine Harlin** (catherine.harlin@msc.org / +62 811-1347-270) paling lambat sebelum tanggal 11 November 2025.
4. Panitia tidak menyediakan uang harian pertemuan maupun honor selain untuk undangan narasumber.

Demikian undangan ini kami sampaikan. Besar harapan para peserta undangan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Andini Kusumasari
Direktur

Lampiran

Kerangka Acuan Kerja Pelatihan Teknis Pelaku FIP di Indonesia

1. Latar Belakang

Fisheries Improvement Program (FIP) merupakan inisiatif kolaboratif antara nelayan, perusahaan, pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk memperbaiki praktek penangkapan ikan agar lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, serta memenuhi standar internasional seperti Marine Stewardship Council (MSC) dan FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries.

Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku FIP di lapangan menghadapi berbagai tantangan teknis dan kelembagaan, antara lain:

- P1 (*Stok & Harvest Strategy*): kesulitan mengakses data stok dan memahami kebijakan pengelolaan perikanan;
- P2 (ETP, habitat, ekosistem): keterbatasan kolaborasi riset dan program observer;
- P3 (*Governance & Compliance*): tumpang tindih regulasi, minim pemahaman atas peran lembaga, serta lemahnya koordinasi antar-stakeholder.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pelatihan ini dirancang guna memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan pelaku FIP dalam memahami alur koordinasi nasional, serta memfasilitasi akses dukungan dari instansi yang berwenang di tingkat pusat maupun daerah.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman praktis pelaku FIP terhadap struktur kelembagaan dan mekanisme koordinasi nasional di sektor perikanan berkelanjutan.
 - Memberikan contoh konkret mengenai alur penyelesaian isu teknis dan kelembagaan dalam implementasi FIP.
 - Mendorong sinergi dan kolaborasi antar-FIP di Indonesia agar pelaksanaan program menjadi lebih efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
-

3. Pendekatan & Metodologi

Pelatihan akan menggunakan pendekatan **praktis berbasis studi kasus**, mengacu pada struktur koordinasi FIP nasional (DJPT KKP, DKP daerah, asosiasi, perguruan tinggi, NGO).

Metode:

- **Sesi Kelas:** paparan singkat mengenai MSC Performance Indicators (P1, P2 dan P3).
 - **Simulasi Kasus:** peserta memecahkan masalah nyata FIP, lalu diarahkan lembaga mana yang berwenang.
 - **Diskusi Panel:** menghadirkan perwakilan pemerintah, asosiasi, dan akademisi.
 - **Pemetaan Stakeholder:** membuat bagan rujukan cepat untuk tiap isu.
-

4. Contoh Alur Koordinasi (*Case Reference*)

Isu FIP	Contoh Lembaga Rujukan Utama
P1 (<i>Stok & Harvest Strategy</i>)	Direktorat PSDI DJPT KKP; Perguruan Tinggi (IPB, UNDIP, UNIBRAW)
Perijinan Kapal & Alat Tangkap	Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat KenKapal Perikanan & Alat Penangkapan Ikan, DJPT-KKP; DKP Provinsi
ETP (Penyu, Lumba-lumba, Hiu)	DKP Provinsi; Perguruan Tinggi lokal; LSM Konservasi (WWF, YKAN, MDPI, LINI)
Habitat & Ekosistem (cth: kerusakan terumbu karang)	Balai Riset KKP; DKP Provinsi; mitra LSM
Kepatuhan & Logbook	Direktorat Logbook & Alokasi Kuota DJPT; Program <i>observer</i> KKP
Aspek Sosial (HRSR)	Asosiasi (AP2HI, APRI, HPPI); LSM sosial; KKP (Subdit Kenelayanan)

5. Peserta Undangan

A. Unsur Pemerintah (3 Perwakilan)

1. Direktorat PSDI KKP
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

B. Unsur Peneliti/Akademisi (1 Perwakilan)

1. Pusat Riset Perikanan BRIN
2. FPIK Universitas Brawijaya
3. FPIK Universitas Pattimura
4. FPIK Universitas Diponegoro
5. FPIK IPB University
6. FPIK Universitas Hassanudin
7. FPIK Universitas Sam Ratulangi
8. FPIK Universitas Lambung Mangkurat
9. Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIP2B) Provinsi NTB

C. Unsur Asosiasi Industri/Industri Perikanan (1 Perwakilan)

1. Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
2. Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI)
3. Asosiasi Perikanan Purse Seine Indonesia (APSI)
4. Asosiasi Perikanan Pole and Line and Hand Line Indonesia (AP2HI)
5. Asosiasi Demersal Indonesia (ADI)
6. Asosiasi Perikanan Layur Indonesia
7. Aruna Indonesia
8. Bali Sustainable Seafood (BSS)
9. PT Sahabat Laut Lestari
10. PT Cassanatama Naturindo
11. PT Sekar Laut Tbk.
12. PT Karya Kencana Sumber Sari

13. Happy Seafood
14. PT Toba Surimi Industries
15. PT Sumber Yala Samudra
16. PT Sarana Tani Pratama
17. PT Sari Laut Jaya Lestari
18. PT Aneka Tuna Indonesia

D. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat/Non Government Organization (1 Perwakilan)

1. Sustainable Fisheries Partnership (SFP)
2. WWF Indonesia
3. Yayasan IPNLF Indonesia (YII)
4. Yayasan JARI
5. Mobula Project Indonesia
6. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)
7. Yayasan LINI
8. Yayasan Masyarakat Dan Perikanan Indonesia (MDPI)
9. Yayasan Pesisir Lestari
10. Yayasan Rekam Nusantara
11. Blue Venture
12. Tuna Consortium
13. Forkom Nelangsa

Total Peserta: 46 orang

3. Agenda Kegiatan

Waktu	Kegiatan	Tujuan / Output	PIC
08.30 – 09.00	Registrasi & Coffee Morning	Peserta melakukan registrasi dan saling berkenalan	KOLEKTIF
09.00 – 09.30	Pembukaan, Sambutan, dan Sesi Foto Bersama	Mengawali kegiatan, menjelaskan tujuan pelatihan, serta dokumentasi bersama	Perwakilan MSC Indonesia
09.30 – 09.45	<i>Ice Breaking & Expectations Sharing</i>	Membangun suasana partisipatif dan menggali ekspektasi peserta	KOLEKTIF
09.45 – 10.15	Sesi 1: Gambaran Umum FIP di Indonesia & Tantangan Lapangan	Pemahaman singkat mengenai kondisi FIP dan tantangan P1–P3 (Diskusi Panel)	Narasumber MSC Indonesia / DJPT KKP
10.15 – 12.15	Sesi 2: Simulasi Kasus FIP (P1–P3)	Peserta bekerja dalam kelompok untuk memecahkan kasus nyata FIP dan mengidentifikasi lembaga rujukan yang tepat	KOLEKTIF
12.15 – 13.15	ISHOMA		
13.15 – 14.45	Sesi 3: Pemetaan Stakeholder dan Penyusunan Panduan Cepat	Peserta membuat bagan rujukan cepat lembaga terkait isu FIP dan menyusun draft Quick Reference Guide	Seluruh Peserta



KOLEKTIF
Synergy To Better

14.45 – 15.15	Sesi 4: Penyusunan & Summary Matriks Update FIP	Setiap kelompok mempresentasikan hasil simulasi dan pemetaan untuk disusun menjadi Matriks Update Nasional	Seluruh Peserta
15.15 – 15.30	Coffee Break		
15.30 – 16.30	Sesi 5: Rencana Tindak Lanjut & Pembentukan Jejaring Nasional Pelaku FIP Penutupan	Penyusunan rencana tindak lanjut koordinasi di wilayah masing-masing dan kesepakatan jejaring nasional Menyimpulkan hasil pembelajaran dan menutup kegiatan	Seluruh Peserta

4. Hasil yang Diharapkan

- **Modul pelatihan teknis FIP**
- **Matriks update perkembangan FIP dari setiap peserta**
- **Panduan Cepat (*Quick Reference Guide*):** daftar lembaga rujukan untuk setiap isu FIP.
- Peserta mampu menyusun **rencana tindak lanjut koordinasi FIP** di wilayah kerja masing-masing.
- Kesepakatan bersama pembentukan **jejaring nasional antar-pelaku FIP** untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi.

5. Rencana Tindak Lanjut

- Penyusunan modul praktis “Ke mana Menghubungi Jika...” (berbasis P1, P2 dan P3).
- Memperkuat **Forum Koordinasi FIP Indonesia** yang lebih rutin (online & offline).
- Pendampingan oleh fasilitator nasional dan MSC Indonesia.

6. Catatan

Sebelum acara peserta akan diminta untuk melakukan update perkembangan FIP masing-masing dalam bentuk matriks beserta tantangan yang dihadapi, akan digunakan dalam diskusi Sesi 1

**Lampiran dan link terkait;
Matriks perkembangan FIP**

Matriks ini digunakan untuk melakukan penilaian awal atas status dan kendala dari masing-masing profile FIP yang kemudian dapat menjadi identifikasi awal untuk diskusi kerjasama antar peserta pelatihan.

Nama Organisasi :

Profile FIP :

No	Prinsip	Indikator / Sub-Komponen	Status Saat Ini	Kendala / Tantangan	Kebutuhan Dukungan / Rencana Tindak Lanjut	Mitra Terkait	Catatan

Jejaring nasional antar pelaku FIP

Memberikan rekomendasi untuk membentuk jejaring nasional FIP Indonesia yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pertukaran pembelajaran antar pelaku FIP di Indonesia, dengan melibatkan unsur pemerintah dan MSC Indonesia di dalamnya.

Melalui jejaring ini, dapat diselenggarakan sesi pelatihan dan diskusi rutin untuk membahas mekanisme koordinasi nasional, sinergi antar program, serta berbagi praktik terbaik dalam implementasi FIP. Apabila diperlukan, KOLEKTIF dapat berperan dalam memfasilitasi atau mengoordinasikan pengelolaan jejaring ini agar berjalan efektif dan berkelanjutan.

9. Penutup

Pelatihan teknis ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi nasional dalam implementasi FIP di Indonesia serta meningkatkan efektivitas upaya menuju perikanan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.

LAPORAN

KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS PELAKU FIP DI INDONESIA

18 – 19 November 2025

Oleh: Herman AP2HI

A. Latar Belakang

Sebagai *FIP implementer* yang bertanggung jawab atas pengelolaan Fisheries Improvement Program (FIP) perikanan tuna di Indonesia, partisipasi AP2HI, YII, dan MDPI diperlukan dalam kegiatan "Pelatihan Teknis Pelaku FIP di Indonesia" yang diselenggarakan oleh KOLEKTIF dengan dukungan MSC Indonesia pada 18 November 2025 di Bali. Berdasarkan *background* acara, kegiatan ini dirancang secara spesifik untuk menjawab tantangan teknis dan kelembagaan di lapangan—seperti pemenuhan indikator stok, habitat, hingga tata kelola (P1-P3)—melalui penguatan alur koordinasi antar pemangku kepentingan. Kehadiran AP2HI tidak hanya penting untuk memutakhirkan matriks perkembangan FIP tuna, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk bertukar pembelajaran dengan pelaku FIP dari komoditas lain (seperti rajungan, kakap-kerapu, dan udang) serta berkontribusi dalam pembentukan jejaring nasional yang efektif guna mendukung perikanan berkelanjutan yang berdaya saing global.

B. Tujuan

Kegiatan Pelatihan Teknis Pelaku FIP di Indonesia dan juga Koordinasi FIP Nasional 2025 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman praktis pelaku FIP terhadap struktur kelembagaan dan mekanisme koordinasi nasional di sektor perikanan berkelanjutan.
2. Memberikan contoh konkret mengenai alur penyelesaian isu teknis dan kelembagaan dalam implementasi FIP.
3. Mendorong sinergi dan kolaborasi antar-FIP di Indonesia agar pelaksanaan program menjadi lebih efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan

C. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan yang menghadiri kegiatan Pelatihan Teknis Pelaku FIP di Indonesia adalah sebagai berikut:

No.	Instansi	Jumlah
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	1
2	Pusat Riset Perikanan BRIN	2
3	FPIK Universitas Brawijaya	1
4	FPIK Universitas Pattimura	1
5	FPIK Universitas Diponegoro	1
6	FPIK IPB University	1
7	FPIK Universitas Hassanudin	1
8	FPIK Universitas Sam Ratulangi	1
9	FPIK Universitas Lambung Mangkurat	1
10	Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIP2B) Provinsi NTB	1
11	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)	1
12	Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI)	1
13	Asosiasi Perikanan Purse Seine Indonesia (APSI)	1
14	Asosiasi Perikanan Pole and Line and Hand Line Indonesia (AP2HI)	1
15	Asosiasi Demersal Indonesia (ADI)	1
16	Asosiasi Perikanan Layur Indonesia	2

17	Aruna Indonesia	1
18	Bali Sustainable Seafood (BSS)	2
19	PT Sahabat Laut Lestari	1
20	PT Cassanatama Naturindo	1
21	PT Sekar Laut Tbk.	1
22	PT Karya Kencana Sumber Sari	1
23	Happy Seafood	1
24	PT Toba Surimi Industries	1
25	PT Sumber Yala Samudra	1
26	PT Sarana Tani Pratama	1
27	PT Sari Laut Jaya Lestari	1
28	PT Aneka Tuna Indonesia	1
29	Sustainable Fisheries Partnership (SFP)	1
30	WWF Indonesia	1
31	Yayasan IPNLF Indonesia (YII)	2
32	Yayasan JARI	1
33	Mobula Project Indonesia	1
34	Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)	1
35	Yayasan LINI	1
36	Yayasan Masyarakat Dan Perikanan Indonesia (MDPI)	3
37	Yayasan Pesisir Lestari	1
38	Yayasan Rekam Nusantara	1
39	Blue Venture	1
40	Tuna Consortium	1
41	Forkom Nelangsa	1
	Total	47

D. Rangkuman Hasil Pertemuan Pelatihan Teknis Pelaku FIP di Indonesia / Koordinasi FIP Nasional tanggal 18 dan 19 November 2025

Hari 1, Selasa 18 November 2025
Sesi Pembukaan: Sambutan-sambutan
<p>Sambutan 1: Pak Hirmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per November ini, MSC Indonesia sudah berstatus lokal/Indonesia yang sebelumnya masih International - Harapan dari pertemuan ini adalah untuk mengatasi beberapa kendala yang sulit dilakukan dalam menjangkau standar FIP dan MSC. Dalam pertemuan ini diperkenalkan juga nanti terkait MSC improvement program: mirip FIP dan menggunakan standard MSC. - Di standard MSC, misal pada P1, bagaimana bisa mengakses informasi stock, lalu P2 soal habitat dan ekosistem: disini bisa berkolaborasi dari jejaring organisasi, asosiasi, termasuk pemerintah, institusi pendidikan. <p>Sambutan 2: Perwakilan DKP Bali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kadis berhalangan hadir. - Intinya, DKP mengapresiasi kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan, untuk memastikan pelaksanaan kuota - Mendorong implementasi nyata di lapangan. Bisa mendorong dan mendukung pemenuhan pasar global untuk spesies-spesies yang membutuhkan pengakuan FIP dan juga MSC.
Sesi Perkenalan dengan cara Game Bingo Perkenalan Pelaku FIP
Sesi perkenalan dilakukan dengan menggunakan metode game Bingo. Dari perkenalan ini, dapat

disimpulkan bahwa AP2HI sudah dikenal luas oleh para stakeholders dan mereka mengetahui bahwa AP2HI sudah lama menjalankan FIP tuna bersama mitra strategisnya (diantaranya MDPI dan IPNLF) bahkan sudah mencapai sertifikasi MSC sejak tahun 2021.

GAME BINGO FIP

Nama :
Lembaga :

Aturan Main:
1. Tuliskan nama kamu di bagian atas kartu.
2. Dalam setiap kotak ada pernyataan, misalnya: "Terlibat dalam FIP udang".
3. Kelilingi ruangan dan cari orang yang sesuai dengan pernyataan di kotak tersebut.
4. Jika kamu menemukan orangnya, tulis nama mereka di dalam kotak itu.
5. Satu orang hanya boleh muncul sekali di kartumu, ya!
6. Usahakan melingkapi 5 kotak dalam satu garis (horizontal, vertikal, atau diagonal)
7. Yang berhasil membuat 5 (lima) BARIS pertama kali, teriak: "BINGO!" dan menang.

Terlibat dalam FIP udang	Memiliki data CPUE perikanan	Nelayan dalam FIP mengisi logbook	Enumerator FIP	Bekerja di FIP >3Tahun
Bekerja di FIP tahun pertama	Mengikuti pelatihan MSC CBT level 2	Ikut menyusun Harvest Strategy	Melakukan pelatihan mitigasi ETP	Terlibat dalam pengawasan perikanan
Bekerja di NGO Konservasi	Bekerja di Universitas atau BRIN	Dari instansi pemerintah	Berasal dari industry	Memiliki sertifikat MSC
Pernah menyusun HCR	Memahami analisis SPR	Terlibat dalam survei habitat	Asesor Lokal	Menguasai RBF
Berpengalaman >5 tahun di perikanan	Ikut dalam kegiatan Pre Assessment	Mengetahui status stok perikanan di wilayahnya	Tergabung dalam Forum Multipihak Perikanan	Terlibat dalam FIP Cumi

GAME BINGO FIP

Nama : HEEMAN
Lembaga : AP2HI

Aturan Main:
1. Tuliskan nama kamu di bagian atas kartu.
2. Dalam setiap kotak ada pernyataan, misalnya: "Terlibat dalam FIP udang".
3. Kelilingi ruangan dan cari orang yang sesuai dengan pernyataan di kotak tersebut.
4. Jika kamu menemukan orangnya, tulis nama mereka di dalam kotak itu.
5. Satu orang hanya boleh muncul sekali di kartumu, ya!
6. Usahakan melingkapi 5 kotak dalam satu garis (horizontal, vertikal, atau diagonal)
7. Yang berhasil membuat 5 (lima) BARIS pertama kali, teriak: "BINGO!" dan menang.

Terlibat dalam FIP udang	Memiliki data CPUE perikanan	Nelayan dalam FIP mengisi logbook	Enumerator FIP	Bekerja di FIP >3Tahun
Bekerja di FIP tahun pertama	Mengikuti pelatihan MSC CBT level 2	Ikut menyusun Harvest Strategy	Melakukan pelatihan mitigasi ETP	Terlibat dalam pengawasan perikanan
Bekerja di NGO Konservasi	Bekerja di Universitas atau BRIN	Dari instansi pemerintah	Berasal dari industry	Memiliki sertifikat MSC
Pernah menyusun HCR	Memahami analisis SPR	Terlibat dalam survei habitat	Asesor Lokal	Menguasai RBF
Berpengalaman >5 tahun di perikanan	Ikut dalam kegiatan Pre Assessment	Mengetahui status stok perikanan di wilayahnya	Tergabung dalam Forum Multipihak Perikanan	Terlibat dalam FIP Cumi

Sesi Pemaparan

Mas Anthony MSC:



- MSC merupakan pembuat standar perikanan berkelanjutan yang kredibel dan melakukan pengawasan didalamnya
- Standarnya ditransformasi dari standard-standard yang sudah ada misal dari FAO (responsibility CoC) yang diolah oleh perikanan, ilmuwan dan NGO.
- Ada pihak ke 3 yang audit yaitu CAB jadi bukan dari MSC langsung untuk mempertahankan kredibilitasnya.
- 19% perikanan dunia tersertifikasi MSC. Untuk kebutuhannya banyak di Eropa dan US dan sudah mulai berkembang di regional asia. Kebutuhan MSC ini tidak wajib tapi volunter dari konsumen atau buyernya.
- Perikanan MSC juga mencakup perikanan air tawar, yang penting perikanan tangkap. Untuk budidaya ada ASC. Yang tidak masuk atau tidak bisa itu adalah perikanan yagn desktruktif.

Marine Mammals dan amphibi itu tidak masuk dalam perikanan yang tidak boleh di MSCkan.

- Entitas yang akan pegang:
- Standard MSC: P1 Stok berkelanjutan, P2 dampak lingkungan, P3 pengelolaan yang efektif (compliance untuk P1 dan P2nya. Dari 3 prinsip tsb ada performance indikator sebanyak 28. Pertemuan ini akan mengeksplor performance indikator ini.
- P2 banyak melibatkan scientific untuk melihat tangkapan lain selain tangkapan utama termasuk ETP dan KK. P3 lebih ke pengelolaan, aturan-aturan yang mengelolan P1 dan P2
- Saat ini adalah tahun transisi untuk standard V2 dan V3. Yang di highlight itu di V3 soal dampak ghost fishing, shark finning (memotong siripnya dan badannya dibuang) – zero tolerance, (3) proses verifikasi dari pihak ke 3 secara independen sebanyak 30% dari operasi penangkapan ikan tahunan: dikelola oleh organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO), beroperasi di laut lepas, tangkapan yang tidak diinginkan yang mencakup spesies ETP dan atau spesies di luar jangkauan (mamalia, burung, amfibi dan reptil)
- MSC ada launching MSC improvement program: mendukung perikanan perikanan: FIP => MSC improvement program => OSF/Full assessment. Ada 8 perikanan yang sudah masuk MSC improvement program.

Mas Heri – KOLEKTIF – Pemaparan gambaran Umum FIP di Indonesia dan Tantangan di Lapangan



- FIP itu merupakan pendekatan bertahap untuk mengatasi isu lingkungan dalam suatu perikanan. Biasanya 5 tahun bahkan sudah 5 tahun belum bisa juga MSC. Di FIP melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi aktif. Memanfaatkan insentif pasar untuk mendorong perubahan positif. Bukan sebuah sertifikasi, melainkan proses peningkatan berkelanjutan – bahkan setelah memperoleh sertifikasi MSC.
- Proses FIP diuraikan ke dalam enam tahapan utama, dimulai dari Tahap 0 (Identifikasi FIP), dilanjutkan dengan Penyusunan, Peluncuran, Implementasi, Improvisasi dalam Pengelolaan, hingga Tahap 5 yaitu Improvisasi di Lapangan.
- Tahapan Implementasi FIP: Penilaian awal (5-20kUSD) => Penyusunan rencana aksi (5-10k) => Implementasi FIP (5-100k) => penilaian penuh (40-100k) => penilaian penuh (40-100K) <=> evaluasi FIP – BMT (bench Marking Tools) (5-10K).
- Terkait BMT, adalah tools evaluasi:
 - Evaluasi rutin terhadap penerapan action plan
 - Diberi tolok ukur: sesuai rencana, tertinggal atau melampaui target
 - Penyesuaian action plan sebagai dokumen hidup yang terus berkembang
- Penilaian perikanan mengacu pada Standar Perikanan MSC (*MSC Fisheries Standard*) yang mencakup tiga prinsip utama. Prinsip pertama berfokus pada keberlanjutan stok ikan, termasuk kondisi stok target dan strategi penangkapan. Prinsip kedua menyoroti

minimalisasi dampak lingkungan, seperti dampak terhadap habitat, ekosistem, serta spesies ETP (*Endangered, Threatened, Protected*). Prinsip ketiga mengatur pengelolaan yang efektif, mencakup tata kelola, kepatuhan hukum, dan penyelesaian konflik. Sistem penilaian menggunakan indikator kinerja dengan rentang skor tertentu: skor di bawah 60 menunjukkan kinerja kurang (merah), skor 60-79 menunjukkan kinerja sedang (kuning), dan skor 80 ke atas menunjukkan standar telah terpenuhi (hijau).

- Terkait perencanaan biaya dan opsi assessment, dapat diestimasi untuk pelaksanaan penilaian awal (*Pre-Assessment*). Terdapat tiga opsi penilaian awal:
 - Opsi 1 (Oleh CAB/Lembaga Auditor): Memerlukan biaya USD 15-20K, namun memberikan rencana aksi komprehensif dan membuka potensi akses pendanaan ke MSC ITM serta OSF.
 - Opsi 2 (Oleh Konsultan Teknis): Memiliki biaya awal lebih rendah, berkisar USD 5-15K.
 - Opsi 3 (*Environmental Rapid Assessment*): Menghasilkan rencana aksi dasar dengan biaya USD 5-15K.
- Secara keseluruhan, estimasi biaya untuk tahapan lain meliputi penyusunan rencana aksi (USD 5-10K), evaluasi FIP menggunakan *Benchmarking Tools* (USD 5-10K), implementasi FIP (USD 5-100K), hingga penilaian penuh atau sertifikasi (USD 40-100K)
- Terkait penyusunan rencana aksi (*action plan*) dan implementasi, harus mencakup durasi maksimal lima tahun dan memenuhi kriteria SMART: *Specific* (tujuan jelas), *Measurable* (terukur), *Agreed* (disepakati pemangku kepentingan), *Realistic* (dapat diterapkan), dan *Time-bound* (memiliki batas waktu). Implementasi di lapangan melibatkan kegiatan kolaboratif seperti pengumpulan data, penempatan *observer*, pelatihan nelayan, dan evaluasi kepatuhan yang dilaporkan secara transparan melalui *FisheryProgress.org*. Selain itu, pentingnya standar *Chain of Custody* (CoC) dibahas untuk memastikan ketertelusuran (*traceability*) produk dari sumber bersertifikat hingga ke pasar. CoC, memastikan bahan bersertifikat bisa dilacak sumbernya, terdapat sistem pemisahan dan identifikasi yang jelas, CoC penting menjaga transparan.
- Biasanya ada beberapa kendala umum di lapangan, antara lain minimnya data stok ikan, belum adanya strategi penangkapan (*Harvest Strategy*), serta kurangnya data terkait *bycatch* dan habitat. Meskipun demikian, terdapat peluang kemitraan yang luas. Pemerintah berperan dalam kerangka hukum dan penegakan aturan, LSM/NGO membantu dalam pengumpulan data dan aspek sosial, Akademisi berkontribusi melalui riset biologi dan sosial-ekonomi, sementara Sektor Swasta/Industri mendukung melalui akses pasar dan pendanaan. Manfaat FIP dirasakan oleh semua pihak, mulai dari stabilitas rantai pasok bagi industri hingga peningkatan kesejahteraan bagi nelayan.
- Ada 1 hal penting untuk mencapai keberhasilan FIP yaitu penekanan pada pentingnya kolaborasi multipihak. Di pertemuan ini diantara tergetnya adalah (1) penyusunan matriks pembaruan FIP (2) pembentukan jejaring nasional pelaku FIP sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berkelanjutan (dalam bentuk group WA).

Sesi Diskusi Kelompok

Sesi diskusi kelompok dilakukan dengan mendiskusikan contoh kasus untuk masing-masing standard atau prinsipal MSC, meliputi P1 soal pengelolaan stock, P2 soal habitat dan ekosistem dan P3 soal pengelolaan perikanan yang efektif. Hasil diskusi masing-masing kelompok kemudian dipresentasikan kepada semua peserta.



Masing-masing kelompok mendiskusikan berbeda-beda jenis perikanan. Jenis perikanan yang didiskusikan adalah perikanan tuna, gurita, snapper-grouper, layur, rajungan, cumi, udang, pelagis kecil (kembung, tongkol, layang) dan lobster.

Secara keseluruhan, beberapa hal penting yang bisa dirangkum dari hasil diskusi kelompok untuk semua perikanan terhadap masing-masing standard/Principal MSC adalah sebagai berikut:

1. P1: Pengelolaan stock ikan yang lestari

- Penting untuk melibatkan akademisi di kampus-kampus untuk mengawal metode, jumlah data dan waktu serta analisa data hasil pengumpul data perikanan agar semua data yang dikumpulkan berbasis ilmiah dan inline dengan pengelolaan stock yang dilakukan oleh Nasional maupun regional (misal RFMO untuk spesies highly migratory)
- Penting untuk mendapatkan dukungan atau dorongan industri (business driven) dalam rangka mendukung pelaksanaan pengumpulan data karena dengan hal itu maka pengumpulan data bisa sustain, tidak by project saja yang mana bisa stop pengumpulan datanya jika dananya berhenti karena projectnya done/close
- Terdapat perbedaan tantangan untuk pengelolaan stock pada spesies yang non-migratory dan highly migratory species. Highly migratory bisa didukung oleh pengelolaan regional (misal RFMO) meskipun nasional belum ada. Namun dengan catatan juga bahwa proses yang terjadi di regional bisa memengaruhi pengelolaan stock di nasional. Adapun pada spesies yang non-migratory, pengelolaan stocknya (HS) sangat bergantung pada Nasional dan olehnya itu dibutuhkan data yang memadai. Dengan demikian, program pengumpulan data pada perikanan yang non-migratory (termasuk yang highly migratory juga sebenarnya) perlu terus dilakukan dan scientific base untuk memudahkan pengelolaan stock di level nasional.
- Sebagai tambahan, dalam mendukung pengelolaan stock, pada standard MSC terbaru nantinya pendataan harus independent verification sehingga diperlukan pihak ketiga untuk melakukan verifikasi dari data-data yang dikumpulkan oleh client.

2. P2: Habitat dan ekosistem

- Instrumen pengelolaan perikanan seperti SASI, perlu diduplikasi sosialisasinya di lokasi-lokasi lain yang tidak mengenal SASI agar komunitas nelayan setempat memiliki referensi untuk melindungi habitat suatu perikanan
- Pada beberapa perikanan yang bisa diamati proses biologi dan spawningnya, seperti snapper-grouper, gurita dan lobster, perlu ada skema insentif untuk

nelayan yang tidak menangkap jenis-jenis ikan tersebut jika sedang bertelur.

- Perlunya edukasi ke market (bisa dalam bentuk kampanye) juga bahwa untuk spesies yang dibawah size (ukuran kecil atau sedang bertelur) tidak boleh dibeli karena secara logika sederhana bahwa kalau misal gurita kecil (misal dibawah 300gram) ditangkap maka bisa menghilangkan stock guritanya di masa depan
- Pada perikanan yang memiliki dampak bycatch tinggi dan/ataupun terhadap lingkungan, maka diperlukan riset modifikasi alat tangkap agar bisa menemukan alat tangkap yang efektif namun tidak berdampak besar terhadap bycatch dan lingkungan
- Perlunya penguatan pengelolaan dalam skala lokal atau otonomi pengelolaan lokal seperti SASI, Rapala Emas ataupun lainnya yang sesuai lokasi dan spesiesnya dan berbasis masyarakat.
- Dalam pencatatan interaksi ETP, logbook perlu dibuat yang paling sederhana untuk bisa mudah dipahami dan digunakan nelayan. Selain itu, perlu insentif untuk nelayan yang mencatat tripnya (formnya ada soal data interaksi ETP) dan juga memanfaatkan ibu-ibu sebagai enumerator: WFC: women fishery community.

3. P3: Pengelolaan yang efektif

- Terdapat perbedaan tantangan pembuatan dan pelaksanaan HS/HCR antara perikanan yang non-migratory (misal, gurita dan snapper-grouper) dan perikanan yang highly migratory (misal, tuna). Yang highly migratory, didukung oleh pengelolaan regional yang mana jika regional sudah melaksanakan HS/HCR maka itu bisa diakui dan meningkatkan skoring, meskipun di Nasional belum ada. Namun yang non-migratory sangat tergantung pada proses yang dilakukan oleh Nasional sehingga jika belum ada HS/HCR maka skoring untuk P1 dan P3 bisa rendah.
- Salah satu tantangan utama dalam proses pengelolaan yang efektif adalah belum terdokumentasinya pengambilan keputusan yang efektif. Yang diperlukan adalah bahwa keputusan yang diambil oleh nasional itu sudah mendapatkan masukan dan rekomendasi dari forum-forum perikanan di daerah (Misal FCMC) dan rekomendasi tersebut dipakai untuk memperbaiki draft suatu pengambilan keputusan dan yang terpenting adalah itu tercatat dan terdokumentas (baik dalam bentuk MoM ataupun berita acara).

Hari 2 Rabu, 19 November 2025 (setengah hari): mini sharing session dan diskusi bebas (volunterily)



- ADI bingung untuk mau mulai maju untuk Full Assessment: forum menjawab bahwa untuk hal ini bisa contoh stepnya AP2HI dimulai
- US lagi alergi atau tidak terima produk gill net. Salah satu efeknya adalah adanya kewajiban COA di perikanan tuna
- Jika ada 2 asosiasi/organisasi yang bergerak bersama di suatu UoA yang sama, maka bisa terpisah profilnya dan bisa juga bersinergi untuk efisiensi dan efektif.
- Ada asosiasi baru yaitu Asosiasi Layur Indonesia. Mereka bertanya bagaimana mendevlop semacam rules yang bisa disetujui oleh anggota mereka dan diakui oleh FIP. Terkait hal ini, bisa menggunakan contoh kode etik member yang open acces di website AP2HI (ditampilkan link ap2hi.org dan ditampilkan contoh kode etik member AP2HI) lalu ditandatangani oleh anggota ALI.
- Pada acara ini, AP2HI diminta untuk memberikan tanggapan/jawaban terkait *what we need and what we can give*. AP2HI menjawab:

What we need:

- Proses pengambilan keputusan yang efektif dan terdokumentasi
- Kebijakan yang berpihak pada perikanan yang berperan aktif dalam sustainability iniatif
- Kebijakan yang berpihak pada perikanan yang termarginalisasi

What we can give:

- Mengupayakan perikanan HL dan PL di Indonesia baik WCPO maupun IO bisa tersertifikasi ekolabel
- Skema insentif untuk nelayan yg sudah berupaya masuk di jalur perikanan berkelanjutan, namun hal ini belum pasti dan masih dipelajari/identifikasi kondisi dan skema yang akan diberlakukan. *masih sebatas ide
- Mengkonsolidasi dukungan dari industri untuk kegiatan mendukung tata kelola perikanan dari pemerintah: Pendataan, pelatihan ke nelayan, sertifikasi (CPIB dll), peningkatan kapasitas nelayan dan komunitas.